



Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula 2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

2012-2016

<http://kepsukab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2012-2016**

Nomor Publikasi : 8203.5.2
Katalog BPS : 9302023.8203

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 56 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://kepsul.kab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2012-2016**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Salahuddin, M.Si

Editor : Dwi Cahyadi

Penulis : Dwi Cahyadi

Pengolah data : Dwi Cahyadi

<http://kepsulkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran /expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sanana, September 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Kepulauan Sula,

Ir. Salahuddin, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
1.2. Kegunaan Statistik PDRB.....	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	4
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	4
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	7
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	9
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	12
2.5 Perubahan Inventori.....	16
2.6 Ekspor dan Impor.....	19
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN MALUKU UTARA TAHUN 2012-2016.....	22
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Pengeluaran.....	22
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	27
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	30
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	31
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	31
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	33
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa.....	34
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	34
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2012-2016.....	36
4.1 PDRB (Nominal).....	36
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	37
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB.....	38
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	38
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	39

4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	40
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	40
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	41
4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	42
PENUTUP.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	47

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	23
Tabel 2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	24
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	25
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	26
Tabel 5. Pertumbuhan Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	26
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016	27
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016	28
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2016.....	29
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2016.....	30
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	30
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	31
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	32
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	33
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	34
Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	35
Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	36
Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2012-2016.....	37
Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2012-2016.....	38
Tabel 19. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	39
Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2012-2016.....	39

Tabel 21.	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	40
Tabel 22.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	41
Tabel 23.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	42
Tabel 24.	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	43

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	25

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	47
Tabel 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	48
Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	49
Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	50
Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	51
Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	52
Tabel 7. Indeks Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	53
Tabel 8. Indeks Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	54
Tabel 9. Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016.....	55
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode lainnya (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial; serta Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<http://kepsulkab.bpsno.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun, dikarenakan keterbatasan data, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah

tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Penghitungan PKRT Tahunan

2.1.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.1.4.2 Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PKRT Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak

menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

2.2.4 Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

2.2.4.1 Sumber data

1. Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SK-LNP): Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
2. Hasil *up-dating* direktori LNPRT: Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
3. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2.2.4.2 Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT ADHB. PK-LNPRT ADHK 2010 diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau

pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Besarnya nilai Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

PK-P Kabupaten/Kota mencakup: PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

2.3.4.1 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

1. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
2. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
3. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
4. Output Bank Indonesia (BI)
5. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2.3.4.2 Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P Provinsi ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property*)

products), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

2.4.4.1 Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2.4.4.2 Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari

barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, PMTB dapat diperoleh dengan dua cara: pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal

yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai *inflator*). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan PMTB ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan

pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

2.5.4.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;

- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2.5.4.2 Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADHK dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian,

atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara melakukan *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

3. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2.6.4 Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

2.6.4.1 Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2.6.4.2 Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang

tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://kepsulkab.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2012-2016

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2012 sampai dengan 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Secara lebih lengkap, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KEPULAUAN SULA MENURUT PENGELUARAN

Terbentuknya total PDRB Menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	728,18	804,98	888,90	975,06	1063,00
2. Konsumsi LNPRT	6,36	7,53	8,74	9,66	10,57
3. Konsumsi Pemerintah	310,25	348,39	399,51	443,45	480,79
4. PMTB	374,23	391,01	443,78	495,94	524,50
5. Perubahan Inventori	115,50	65,62	-38,72	100,47	-14,48
6. Ekspor	854,80	1.062,91	1154,34	1.244,06	1.262,71
7. Impor	1.123,71	1.264,33	1247,80	1.476,09	1.378,94
Total PDRB	1.265,62	1.416,12	1.608,75	1.792,56	1.948,16

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sula selama periode tahun 2012 s.d. 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2012, nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 1.265,62 miliar. Kenaikan pada tahun-tahun selanjutnya berkisar dari 150,50 miliar sampai 192,63 miliar. Peningkatan tertinggi yaitu sebesar 192,63 miliar terjadi pada tahun 2014.

Pada tahun 2012-2016 Kabupaten Kepulauan Sula tidak melakukan perdagangan internasional sehingga tidak ada nilai ekspor dan impor luar negeri. Ekspor dan Impor di Kabupaten Kepulauan Sula hanya terjadi antar daerah (dalam negeri). Pada tahun 2012-2016 nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar daerah, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sula masih sangat bergantung dengan daerah lain. Hampir semua produk makanan jadi merupakan impor dari luar daerah.

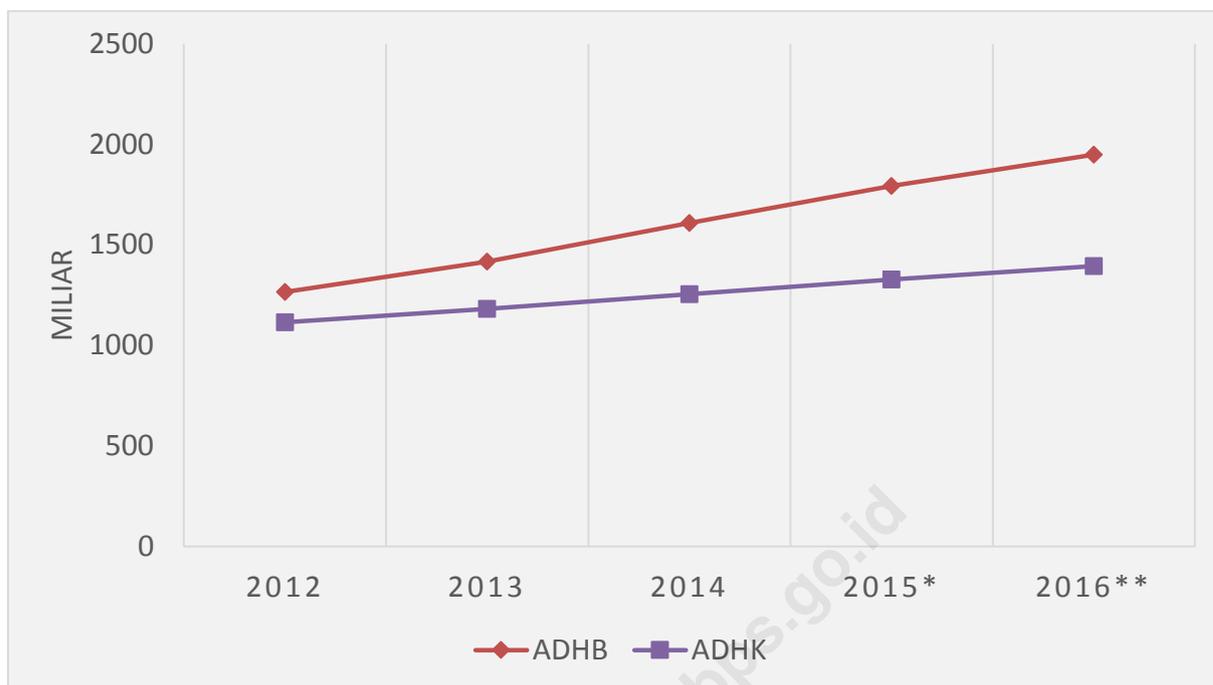
**Tabel 2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	673,66	700,94	736,93	770,46	808,19
2. Konsumsi LNPRT	6,00	6,87	7,45	7,75	8,08
3. Konsumsi Pemerintah	274,44	290,10	313,03	335,64	351,26
4. PMTB	344,85	358,93	389,42	422,61	439,84
5. Perubahan Inventori	109,79	54,88	-32,31	100,32	-10,48
6. Ekspor	860,61	950,02	1.033,84	1.112,40	1.101,93
7. Impor	1.155,11	1.180,04	1.194,24	1.421,37	1.304,01
Total PDRB	1.114,24	1.181,71	1.254,12	1.327,81	1.394,80

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2012 sampai 2016, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan berkisar antara 66,99 miliar sampai 73,69 miliar. Peningkatan terbesar yaitu sebesar 73,69 miliar terjadi pada tahun 2015.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**



Dari Grafik 1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57,54	56,84	55,25	54,40	54,56
2. Konsumsi LNPRT	0,50	0,53	0,54	0,54	0,54
3. Konsumsi Pemerintah	24,51	24,60	24,83	24,74	24,68
4. PMTB	29,57	27,61	27,59	27,67	26,92
5. Perubahan Inventori	9,13	4,63	-2,41	5,60	-0,74
6. Ekspor	67,54	75,06	71,75	69,40	64,82
7. Impor	88,79	89,28	77,56	82,35	70,78
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3, selama periode 2012 sampai 2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen), meskipun proporsinya relatif mengalami penurunan. Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mempunyai peran yang relatif besar, karena memiliki *share* terhadap PDRB

berkisar antara 26,92 sampai 29,57. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 24,51 sampai 24,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,05	5,13	4,55	4,90
2. Konsumsi LNPRT	14,46	8,38	4,02	4,30
3. Konsumsi Pemerintah	5,71	7,90	7,22	4,65
4. PMTB	4,08	8,50	8,52	4,08
5. Perubahan Inventori	-50,01	-158,86	-410,55	-110,45
6. Ekspor	10,39	8,82	7,60	-0,94
7. Impor	2,16	1,20	19,02	-8,26
Total PDRB	6,05	6,13	5,88	5,04

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula dari tahun 2012 sampai 2016 masing-masing sebesar 6,05 persen (2013); 6,13 persen (2014); 5,88 persen (2015); dan 5,04 persen (2016). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 6,13 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,95 persen.

Tabel 5. Pertumbuhan Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,24	5,03	4,92	3,93
2. Konsumsi LNPRT	3,44	7,10	6,26	4,90
3. Konsumsi Pemerintah	6,23	6,27	3,53	3,60
4. PMTB	0,39	4,61	2,98	1,62
5. Perubahan Inventori	13,65	0,25	-16,45	37,97
6. Ekspor	12,64	-0,20	0,16	2,46
7. Impor	10,14	-2,48	-0,61	1,83
Total PDRB	5,50	7,04	5,24	3,46

Sementara itu, pertumbuhan implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan (bertanda positif) tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa harga barang/jasa secara rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode tahun 2012 sampai 2016. Secara umum kenaikan harga paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,04 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	728,18	804,98	888,90	975,06	1.063,00
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	673,66	700,94	736,93	770,46	808,19
c. Proporsi terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	57,54	56,84	55,25	54,40	54,56
Jumlah Penduduk (Jiwa)	89.374	91.406	93.435	95.285	97.177
Rata-Rata Konsumsi Per-Kapita/Tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	8.147,51	8.806,67	9.513,60	10.233,11	10.938,81
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	7.537,51	7.668,44	7.887,12	8.085,84	8.316,71
c. Pertumbuhan ADHK 2010 (Persen)	-	1,74	2,85	2,52	2,86

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2016, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik secara nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2012 sampai 2016 secara umum mengalami penurunan. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 57,54 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 54,40 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Jika dilihat pengeluaran konsumsi per-kapita, maka rata-rata konsumsi per-kapita di Kabupaten Kepulauan Sula juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2012 rata-rata konsumsi per-kapita/tahun ADHB sebesar 8,15 juta. Pada tahun 2016 nilainya sebesar 10,94 juta. Sedangkan berdasarkan nilai ADHK 2010, pada tahun 2012 nilainya sebesar 7,54 juta dan pada 2016 sebesar 8,32 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 1,74 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 sebesar 2,85 persen, pada tahun 2015 sebesar 2,52 persen dan pada tahun 2016 sebesar 2,86 persen.

**Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	64,87	63,51	62,32	61,27	60,71
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,16	4,26	4,40	4,38	4,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,78	11,29	11,56	11,87	12,40
d. Kesehatan & Pendidikan	3,31	3,26	3,29	3,38	3,46
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,77	11,32	11,86	12,10	12,09
f. Hotel & Restoran	1,44	1,48	1,53	1,54	1,56
g. Lainnya	4,67	4,87	5,05	5,47	5,41
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari table 7, terlihat bahwa konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga yang lainnya. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi untuk makanan

pada masing-masing tahun mencapai 64,87 persen (2012); 63,51 persen (2013); 62,32 persen (2014); 61,27 persen (2015); dan 60,71 persen (2016).

Pengeluaran untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga juga mempunyai peranan yang relatif besar terhadap konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi sekitar 10,78 sampai 12,40 persen. Berbeda dengan pola proporsi konsumsi untuk makanan, minuman, dan rokok yang cenderung mengalami trend menurun dari tahun ke tahun, pola proporsi konsumsi untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga cenderung meningkat selama periode 2012 sampai 2016. Proporsi konsumsi untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga pada masing-masing tahun mencapai 10,78 persen (2012); 11,29 persen (2013); 11,56 persen (2014); 11,87 persen (2015); dan 12,40 persen (2016).

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,92	4,68	3,39	4,14
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,00	4,00	4,42	4,19
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,19	6,09	7,07	5,93
d. Kesehatan & Pendidikan	4,00	6,13	7,22	4,85
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,90	6,57	7,28	7,77
f. Hotel & Restoran	8,18	9,04	8,18	9,08
g. Lainnya	5,79	5,15	5,65	5,43

Dilihat dari pertumbuhan riil-nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok cukup fluktuatif pada periode 2012 sampai 2016. Pertumbuhan riil pada masing-masing tahun sebesar 2,92 persen (2012); 4,68 persen (2013); 3,39 persen (2015); dan 4,14 persen (2016). Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Nilai pertumbuhan riil yang positif menunjukkan adanya peningkatan kuantitas (volume) dalam hal konsumsi makanan dari waktu ke waktu, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	5,16	3,51	4,31	3,73
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,68	9,62	4,63	4,53
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,08	6,51	5,19	7,54
d. Kesehatan & Pendidikan	4,74	4,89	5,20	6,27
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,68	8,56	4,34	1,05
f. Hotel & Restoran	5,19	4,53	2,05	1,50
g. Lainnya	9,10	8,93	12,28	2,39

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 5,16 persen (2013); 3,51 persen (2014); 4,31 persen (2015); dan 3,73 persen (2016). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki mengalami peningkatan sebesar 8,68 persen (2013); 9,62 persen (2014); 4,63 persen (2015); dan 4,53 persen (2016).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	6,36	7,53	8,74	9,66	10,57
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6,00	6,87	7,45	7,75	8,08
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,50	0,53	0,54	0,54	0,54

Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu 0,50 persen pada tahun 2012; 0,53 persen pada tahun 2013; dan 0,54 persen pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Pertumbuhan riil per tahun berkisar antara 4,02 persen sampai 14,42 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	310,25	348,38	399,51	443,45	480,79
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	274,44	290,10	313,03	335,64	351,26
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	24,51	24,60	24,83	24,74	24,68

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 310,25 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai 480,79 miliar rupiah.

Secara umum, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung stagnan pada kisaran 24,51 sampai 24,83 persen. Ini menunjukkan kestabilan konsumsi pemerintah dalam sumbangsuhnya terhadap PDRB. Dengan kata lain, peningkatan konsumsi pemerintah berimbang dengan peningkatan nilai PDRB.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik ADHB maupun ADHK 2010). Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan

sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	374,23	391,01	443,78	495,94	524,50
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	344,85	358,93	389,42	422,61	439,84
Proporsi terhadap PDRB (%)	29,57	27,61	27,59	27,67	26,92
Struktur PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (Miliar Rp)	268,57	275,25	303,01	330,12	348,59
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	105,66	115,76	140,77	165,82	175,92
Proporsi PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (%)	71,77	70,40	68,28	66,56	66,46
b. Non Bangunan (%)	28,23	29,60	31,72	33,44	33,54
Pertumbuhan (ADHK)					
a. Bangunan (%)	-	2,72	7,55	6,36	4,15
b. Non Bangunan (%)	-	7,40	10,71	13,41	3,91
c. Total PMTB (%)	-	4,08	8,50	8,52	4,08

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada Tabel 12 terlihat bahwa nilai total PMTB ADHB pada tahun 2012 sebesar 374,23 miliar rupiah dan pada tahun 2016 menjadi 524,50 miliar rupiah. Begitu juga dengan nilai total PMTB ADHK pada tahun 2012 sebesar 344,85 miliar rupiah dan pada tahun 2016 menjadi 439,84 miliar rupiah. Proporsi PMTB terhadap PDRB relatif mengalami penurunan dari tahun 2012 ke 2016. Pada tahun 2012 proporsinya sebesar 29,57 persen dan pada 2016 menjadi 26,92 persen.

Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB terus mengalami penurunan selama periode 2012-2016. Sebaliknya, sub komponen non bangunan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, proporsi sub komponen bangunan hampir tiga kali lipat sub komponen non bangunan, sementara pada tahun 2016 sekitar dua kali lipat. Proporsi sub komponen bangunan pada tahun 2012 sebesar 71,77 persen dan pada tahun 2016 sebesar

66,46 persen. Proporsi sub komponen non bangunan pada tahun 2012 sebesar 28,23 persen dan pada tahun 2016 sebesar 33,54 persen.

Pada tahun 2013-2016 pertumbuhan total PMTB cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 4,08 persen, tahun 2014 sebesar 8,50 persen, tahun 2015 8,52 dan tahun 2016 sebesar 4,08 persen. Sama halnya dengan pertumbuhan total PMTB, pertumbuhan sub komponen bangunan dan non bangunan nilainya cukup fluktuatif. Pertumbuhan sub komponen bangunan berkisar antara 2,72 sampai 7,55 persen, sedangkan pertumbuhan sub komponen non bangunan berkisar antara 3,91 sampai 13,41 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	115,51	65,62	-38,72	100,46	-14,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	109,79	54,88	-32,31	100,32	-10,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	9,13	4,63	-2,41	5,60	-0,74

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis cukup rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam

pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2012, 2013 dan 2015, perubahan inventori bertanda positif (terjadi penambahan persediaan barang) yaitu masing-masing sebesar 115,51 miliar rupiah (2012); 65,62 miliar rupiah (2013); dan 100,46 miliar rupiah (2015). Sedangkan pada tahun 2014 dan 2016, perubahan inventori mempunyai tanda negatif (terjadi pengurangan persediaan barang) yaitu sebesar minus 38,72 miliar rupiah dan minus 14,48 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	854,80	1.062,91	1.154,34	1.244,06	1.262,71
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	860,61	950,02	1.033,84	1.112,40	1.101,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	67,54	75,06	71,75	69,40	64,82

Pada Tabel 14 menunjukkan transaksi ekspor Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2012 sampai 2016. Ekspor ke luar negeri tidak ada. Nilai ekspor Kabupaten Kepulauan Sula ke daerah lain terus mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Pada tahun 2013 proporsi ekspor terhadap total PDRB mengalami peningkatan menjadi 75,06 persen. Pada tahun 2014 sampai 2016 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 proporsinya sebesar 64,82 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu daerah terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.123,71	1.264,33	1.247,80	1.476,09	1.378,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.155,11	1.180,04	1.194,24	1.421,37	1.304,01
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	88,79	89,28	77,56	82,35	70,78

Di Kabupaten Kepulauan Sula hanya terdapat transaksi perdagangan impor antar daerah, tidak ada transaksi impor luar negeri. Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai impor baik secara nominal maupun riil cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2015. Pada tahun 2016, nilai impor mengalami penurunan. Proporsi impor terhadap total PDRB cukup fluktuatif, berkisar antara 70,78 sampai 89,28 persen.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2012-2016

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, maka disajikan data PDRB per-kapita.

Tabel 16. PDRB Per-kapita Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	8.147,51	8.806,67	9.513,60	10.233,11	10.938,81
ADHK	7.537,51	7.668,44	7.887,12	8.085,84	8.316,71
Pertumbuhan PDRB per Kapita (Persen)	-	1,74	2,85	2,52	2,86

PDRB per-kapita Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kepulauan Sula rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per-kapita baik ADHB maupun ADHK memiliki pola yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, PDRB per-kapita ADHB bernilai 8.147,51 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016, PDRB per-kapita ADHB

Kabupaten Kepulauan Sula mencapai 10.938,81 juta rupiah. Sedangkan PDRB per-kapita ADHK pada tahun 2012 bernilai 7.537,51 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2016, PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Kepulauan Sula mencapai 8.316,71 juta rupiah.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara riil juga selalu bernilai positif pada periode 2012 sampai 2016. Pertumbuhan PDRB per-kapita mencapai 1,74 persen pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 2,85 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB per-kapita mengalami perlambatan menjadi 2,52 persen dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 2,86 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Kepulauan Sula (di atas 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun dalam konsumsi akhir rumah tangga, di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	728,18	804,98	888,90	975,06	1.063,00
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	854,80	1.062,91	1.154,34	1.244,06	1.262,71
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,85	0,76	0,77	0,78	0,84

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah 0,85 kali dari produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk kebutuhan ekspor. Perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan total ekspor pada periode 2012 sampai

2016 berkisar pada angka 0,76 sampai dengan 0,85. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah produk yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Sula diekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (PMTB). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	728,18	804,98	888,90	975,06	1.063,00
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	374,23	391,01	443,78	495,94	524,50
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,95	2,06	2,00	1,97	2,03

Pada tahun 2012 sampai 2016, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stagnan pada angka 2. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 1,95; pada tahun 2013 sebesar 2,06; pada tahun 2014 sebesar 2,00; pada tahun 2015 sebesar 1,97 dan pada tahun 2016 sebesar 2,03. Ini berarti bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Sula berimbang dengan peningkatan investasi fisiknya.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 19. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	728,18	804,98	888,90	975,06	1.063,00
b. LNPRT	6,36	7,53	8,74	9,66	10,57
c. Pemerintah	310,25	348,38	399,51	443,45	480,79
Jumlah	1.044,79	1.160,90	1.297,15	1.428,18	1.554,37
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.265,62	1.416,12	1.608,75	1.792,56	1.948,16
Proporsi (Persen)	82,55	81,98	80,63	79,67	79,79

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (sekitar 80 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung menurun. Pada tahun 2012 proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB sebesar 82,55 persen. Kemudian terus menurun sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 proporsinya sebesar 79,67 persen. Pada tahun 2016 proporsinya meningkat menjadi 79,79 persen.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	854,80	1.062,91	1.154,34	1.244,06	1.262,71
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	374,23	391,01	443,78	495,94	524,50
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2,28	2,72	2,60	2,51	2,41

Pada tahun 2012 sampai 2016 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (Tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB pada tahun 2012 sampai 2016 memiliki pola yang cenderung menurun.

Rasio ekspor terhadap PMTB pada tahun 2012 sebesar 2,28. Pada tahun 2013, rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 2,72. Pada tahun 2014 sampai 2016, rasionya terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 rasionya sebesar 2,41. Penurunan rasio pada periode ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.265,62	1.416,12	1.608,75	1.792,56	1.948,16
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.123,71	1.264,33	1.247,80	1.476,09	1.378,94
Rasio PDRB terhadap Impor	1,13	1,12	1,29	1,21	1,41

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2012 sampai 2016 cenderung meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dimana rasio pada tahun 2015 sebesar 1,21 dan pada tahun 2016 sebesar 1,41. Kabupaten Kepulauan Sula masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain (ditunjukkan dengan rasio PDRB terhadap impor yang mendekati angka 1). Namun, ada perubahan ke arah yang lebih baik karena rasio PDRB terhadap impornya memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.265,62	1.416,12	1.608,75	1.792,56	1.948,16
%	52,97	53,83	56,32	54,84	58,55
Total Impor ADHB (Miliar Rp)	1.123,71	1.264,33	1.247,80	1.476,09	1.378,94
%	47,03	47,27	43,68	45,16	41,45
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	2.389,32	2.680,45	2.856,54	3.268,64	3.327,10
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah, dengan rentang 41 sampai 47 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 53 sampai 59 persen dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat. Pada tahun 2012 permintaan akhir sebesar 2.389,32 miliar rupiah dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 3.327,10 miliar rupiah.

Di sisi lain penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.256,62 miliar rupiah (2012); 1.416,75 miliar rupiah (2013); 1.608,75 miliar rupiah (2014); 1.792,56 miliar rupiah (2015); dan 1.948,16 miliar rupiah (2016). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor dengan nilai masing-masing sebesar 1.123,71 miliar rupiah (2012); 1.264,33 miliar rupiah (2013); 1.247,80 miliar rupiah (2014); 1.476,09 miliar rupiah (2015); dan 1.378,94 miliar rupiah (2016).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar daerah (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto". Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus. Sebaliknya apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka terjadi defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk dan keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya jika

posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor. Meskipun hanya berlaku secara total, namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	854,80	1.062,91	1.154,34	1.244,06	1.262,71
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.123,71	1.264,33	1.247,80	1.476,09	1.378,94
Net Ekspor (X-M) (Miliar Rp)	-268,91	-201,42	-93,46	-232,03	-116,22
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,76	0,84	0,93	0,84	0,92

Selama periode 2012-2016, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula dengan daerah lain selalu menunjukkan nilai negative. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula yang terjadi antara tahun 2012 sampai dengan 2016 tercatat masing-masing sebesar minus 268,91 miliar rupiah (2012); minus 201,42 miliar rupiah (2013); minus 93,46 miliar rupiah (2014); minus 232,03 miliar rupiah (2015); dan minus 116,22 miliar rupiah (2016).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung berfluktuatif dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 rasionya sebesar 0,76 dan terus meningkat menjadi 0,93 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 turun menjadi 0,84 kemudian naik kembali pada tahun 2016 menjadi 0,92.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi

tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula icor adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1.265,62	1.416,12	1.608,75	1.792,56	1.948,16
Perubahan (Miliar Rp)	-	150,50	192,63	183,81	155,61
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	374,23	391,01	443,78	495,94	524,50
ICOR	-	2,60	2,30	2,70	3,37

Data di atas menunjukkan bahwa nilai ICOR Kabupaten Kepulauan Sula cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2016. Pada tahun 2013 nilai ICOR sebesar 2,60 dan turun pada 2014 menjadi sebesar 2,30. Pada tahun 2015 dan 2016 nilainya meningkat menjadi 2,70 dan 3,37.

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 sampai 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pemerintah dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti jumlah penduduk) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 sampai 2016, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990, Jakarta.

_____, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.

_____, statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta 2000.

_____, Profil Ekonomi Rumahtangga 1998, Jakarta 1999.

Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

United Nations, *A System of National Accounts, Studies in Methods*, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

_____, *Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods*, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.

_____, Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

_____, Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries, Paris, 1976.

World Bank, System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

<http://kepsulkab.bps.go.id>

<http://kepsukrab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	728.175,45	804.982,32	888.902,93	975.062,18	1.063.000,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	472.366,87	511.261,45	553.930,14	597.400,95	645.325,86
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	30.322,37	34.272,29	39.071,61	42.689,25	46.492,56
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	78.480,53	90.914,99	102.729,91	115.706,40	131.802,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	24.119,58	26.273,86	29.248,17	32.991,53	36.760,64
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	78.413,53	91.099,64	105.393,73	117.964,83	128.464,45
1.f. Hotel dan Restoran	10.484,87	11.931,85	13.599,58	15.014,26	16.623,06
1.g. Lainnya	33.987,71	39.228,22	44.929,79	53.294,95	57.531,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.361,72	7.532,69	8.743,79	9.664,62	10.574,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	310.250,31	348.384,69	399.506,36	443.453,72	480.792,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	374.230,18	391.011,04	443.776,80	495.935,94	524.501,66
4.a. Bangunan	268.567,71	275.254,86	303.006,23	330.117,01	348.585,45
4.b. Non-Bangunan	105.662,47	115.756,19	140.770,57	165.818,93	175.916,21
5. Perubahan Inventori	115.509,17	65.620,91	(38.720,97)	100.464,62	(14.483,29)
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(268.910,07)	(201.416,56)	(93.461,59)	(232.025,33)	(116.222,45)
8.a. Ekspor	854.798,01	1.062.914,97	1.154.335,39	1.244.060,47	1.262.714,84
8.b. Impor	1.123.708,08	1.264.331,53	1.247.796,98	1.476.085,80	1.378.937,29
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.265.616,77	1.416.115,10	1.608.747,32	1.792.555,77	1.948.163,82

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

	<i>(Juta Rupiah)</i>				
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	673.657,61	700.941,53	736.932,63	770.459,60	808.192,59
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	447.101,95	460.170,99	481.686,00	498.037,10	518.640,21
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	25.185,38	26.192,80	27.240,51	28.445,02	29.636,16
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	69.052,99	74.015,78	78.523,45	84.077,23	89.059,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	23.011,41	23.933,00	25.399,30	27.233,90	28.554,86
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	70.192,15	75.032,40	79.960,49	85.779,20	92.441,59
1.f. Hotel dan Restoran	9.136,75	9.884,52	10.778,36	11.660,04	12.718,48
1.g. Lainnya	29.976,97	31.712,05	33.344,53	35.227,12	37.141,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.001,62	6.869,73	7.445,60	7.745,04	8.078,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	274.440,05	290.101,98	313.032,91	335.636,00	351.257,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	344.854,16	358.929,14	389.422,48	422.613,60	439.835,61
4.a. Bangunan	244.475,03	251.121,44	270.069,21	287.251,80	299.176,50
4.b. Non-Bangunan	100.379,12	107.807,70	119.353,28	135.361,80	140.659,11
5. Perubahan Inventori	109.794,12	54.882,97	(32.305,54)	100.323,82	(10.482,47)
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(294.505,71)	(230.019,23)	(160.403,22)	(308.963,61)	(202.081,93)
8.a. Ekspor	860.605,25	950.020,51	1.033.840,79	1.112.404,63	1.101.931,65
8.b. Impor	1.155.110,96	1.180.039,74	1.194.244,01	1.421.368,24	1.304.013,58
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.114.241,85	1.181.706,11	1.254.124,87	1.327.814,46	1.394.799,52

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

	<i>(Juta Rupiah)</i>				
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	57,54	56,84	55,25	54,40	54,56
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	37,32	36,10	34,43	33,33	33,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,40	2,42	2,43	2,38	2,39
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,20	6,42	6,39	6,45	6,77
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,91	1,86	1,82	1,84	1,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,20	6,43	6,55	6,58	6,59
1.f. Hotel dan Restoran	0,83	0,84	0,85	0,84	0,85
1.g. Lainnya	2,69	2,77	2,79	2,97	2,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,50	0,53	0,54	0,54	0,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	24,51	24,60	24,83	24,74	24,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	29,57	27,61	27,59	27,67	26,92
4.a. Bangunan	21,22	19,44	18,83	18,42	17,89
4.b. Non-Bangunan	8,35	8,17	8,75	9,25	9,03
5. Perubahan Inventori	9,13	4,63	(2,41)	5,60	(0,74)
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(21,25)	(14,22)	(5,81)	(12,94)	(5,97)
8.a. Ekspor	67,54	75,06	71,75	69,40	64,82
8.b. Impor	88,79	89,28	77,56	82,35	70,78
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	60,46	59,32	58,76	58,02	57,94
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	40,13	38,94	38,41	37,51	37,18
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,26	2,22	2,17	2,14	2,12
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,20	6,26	6,26	6,33	6,39
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,07	2,03	2,03	2,05	2,05
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,30	6,35	6,38	6,46	6,63
1.f. Hotel dan Restoran	0,82	0,84	0,86	0,88	0,91
1.g. Lainnya	2,69	2,68	2,66	2,65	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,58	0,59	0,58	0,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	24,63	24,55	24,96	25,28	25,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	30,95	30,37	31,05	31,83	31,53
4.a. Bangunan	21,94	21,25	21,53	21,63	21,45
4.b. Non-Bangunan	9,01	9,12	9,52	10,19	10,08
5. Perubahan Inventori	9,85	4,64	(2,58)	7,56	(0,75)
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Impor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(26,43)	(19,47)	(12,79)	(23,27)	(14,49)
8.a. Ekspor	77,24	80,39	82,44	83,78	79,00
8.b. Impor	103,67	99,86	95,23	107,05	93,49
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,55	10,43	9,69	9,02
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,23	8,35	7,85	8,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13,03	14,00	9,26	8,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,84	13,00	12,63	13,91
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,93	11,32	12,80	11,42
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,18	15,69	11,93	8,90
1.f. Hotel dan Restoran	13,80	13,98	10,40	10,72
1.g. Lainnya	15,42	14,53	18,62	7,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18,41	16,08	10,53	9,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	12,29	14,67	11,00	8,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,48	13,49	11,75	5,76
4.a. Bangunan	2,49	10,08	8,95	5,59
4.b. Non-Bangunan	9,55	21,61	17,79	6,09
5. Perubahan Inventori	(43,19)	(159,01)	(359,46)	(114,42)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(25,10)	(53,60)	148,26	(49,91)
8.a. Ekspor	24,35	8,60	7,77	1,50
8.b. Impor	12,51	(1,31)	18,30	(6,58)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	11,89	13,60	11,43	8,68

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

Komponen Pengeluaran	(Juta Rupiah)			
	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,05	5,13	4,55	4,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,92	4,68	3,39	4,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,00	4,00	4,42	4,19
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,19	6,09	7,07	5,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,00	6,13	7,22	4,85
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,90	6,57	7,28	7,77
1.f. Hotel dan Restoran	8,18	9,04	8,18	9,08
1.g. Lainnya	5,79	5,15	5,65	5,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14,46	8,38	4,02	4,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,71	7,90	7,22	4,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,08	8,50	8,52	4,08
4.a. Bangunan	2,72	7,55	6,36	4,15
4.b. Non-Bangunan	7,40	10,71	13,41	3,91
5. Perubahan Inventori	(50,01)	(158,86)	(410,55)	(110,45)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(21,90)	(30,27)	92,62	(34,59)
8.a. Ekspor	10,39	8,82	7,60	(0,94)
8.b. Impor	2,16	1,20	19,02	(8,26)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,05	6,13	5,88	5,04

Tabel 7. Indeks Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016

<i>(Juta Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	110,55	122,07	133,90	145,98
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	108,23	117,27	126,47	136,62
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	113,03	128,85	140,78	153,33
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	115,84	130,90	147,43	167,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	108,93	121,26	136,78	152,41
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	116,18	134,41	150,44	163,83
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	113,80	129,71	143,20	158,54
1.g. Lainnya	100,00	115,42	132,19	156,81	169,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	118,41	137,44	151,92	166,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	112,29	128,77	142,93	154,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	104,48	118,58	132,52	140,15
4.a. Bangunan	100,00	102,49	112,82	122,92	129,79
4.b. Non-Bangunan	100,00	109,55	133,23	156,93	166,49
5. Perubahan Inventori	100,00	56,81	(33,52)	86,98	(12,54)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	74,90	34,76	86,28	43,22
8.a. Ekspor	100,00	124,35	135,04	145,54	147,72
8.b. Impor	100,00	112,51	111,04	131,36	122,71
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	111,89	127,11	141,63	153,93

Tabel 8. Indeks Perkembangan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,05	109,39	114,37	119,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	102,92	107,74	111,39	116,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	104,00	108,16	112,94	117,67
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	107,19	113,71	121,76	128,97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,00	110,38	118,35	124,09
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	106,90	113,92	122,21	131,70
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	108,18	117,97	127,62	139,20
1.g. Lainnya	100,00	105,79	111,23	117,51	123,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	107,99	117,04	121,74	126,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	105,71	114,06	122,30	127,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	104,08	112,92	122,55	127,54
4.a. Bangunan	100,00	102,72	110,47	117,50	122,38
4.b. Non-Bangunan	100,00	107,40	118,90	134,85	140,13
5. Perubahan Inventori	100,00	49,99	(29,42)	91,37	(9,55)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	78,10	54,47	104,91	68,62
8.a. Ekspor	100,00	110,39	120,13	129,26	128,04
8.b. Impor	100,00	102,16	103,39	123,05	112,89
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,05	112,55	119,17	125,18

Tabel 9. Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012-2016

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	109,40	113,83	119,68	125,12	131,25
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107,95	111,10	116,30	120,25	125,22
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110,65	115,07	119,67	124,97	130,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,53	118,48	125,69	134,58	142,56
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	106,93	111,21	118,02	126,55	132,69
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	115,16	123,10	131,18	140,73	151,66
1.f. Hotel dan Restoran	118,92	128,66	140,29	151,77	165,54
1.g. Lainnya	114,46	121,08	127,32	134,50	141,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,06	130,56	141,51	147,20	153,53
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	115,44	122,03	131,68	141,18	147,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	124,60	129,69	140,71	152,70	158,92
4.a. Bangunan	115,56	118,70	127,66	135,78	141,42
4.b. Non-Bangunan	153,94	165,34	183,04	207,59	215,72
5. Perubahan Inventori	239,76	119,85	(70,55)	219,08	(22,89)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	153,64	120,00	83,68	161,18	105,42
8.a. Ekspor	108,35	119,61	130,16	140,05	138,74
8.b. Impor	117,16	119,68	121,13	144,16	132,26
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	112,67	119,49	126,82	134,27	141,04

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2013-2016**

<i>(Juta Rupiah)</i>				
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,24	5,03	4,92	3,93
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,16	3,51	4,31	3,73
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8,68	9,62	4,63	4,53
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,08	6,51	5,19	7,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,74	4,89	5,20	6,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,68	8,56	4,34	1,05
1.f. Hotel dan Restoran	5,19	4,53	2,05	1,50
1.g. Lainnya	9,10	8,93	12,28	2,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,44	7,10	6,26	4,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6,23	6,27	3,53	3,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	0,39	4,61	2,98	1,62
4.a. Bangunan	(0,22)	2,36	2,43	1,39
4.b. Non-Bangunan	2,00	9,85	3,86	2,09
5. Perubahan Inventori	13,65	0,25	(16,45)	37,97
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(4,10)	(33,46)	28,89	(23,42)
8.a. Ekspor	12,64	(0,20)	0,16	2,46
8.b. Impor	10,14	(2,48)	(0,61)	1,83
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	5,50	7,04	5,24	3,46

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Jln. Yos Sudarso, KM. 10, Desa Pohea,
Kec. Sanana Utara, Kepulauan Sula 97795
Mailbox : bps8203@bps.go.id